

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2023

PERDAKAB. KOTABARU NO.06, LD 2023/NO.06,TLD NO. 4, 60 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu di daerah. Penyelenggaraan SPBE juga memberikan kepastian regulasi, arah, dan landasan teknis bagi pelayanan publik berbasis teknologi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan SPBE nasional, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPBE di lingkungan pemerintah daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.3 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.37 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.16 Tahun 2005; PERPRES No.81 Tahun 2012; PP 112 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2017; PP No.54 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.22 Tahun 2021; PERPRES 185 Tahun 2014; PERMEN LH No.P68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016; PERMEN PUPR No.04/PRT/M/2017; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2021.
 - Pengelolaan air limbah domestik diperlukan untuk menjaga lingkungan yang sehat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan volume limbah yang berpotensi mencemari sumber air. Urusan ini merupakan kewenangan wajib daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta termasuk standar pelayanan minimal. Pemerintah pusat juga menetapkan pedoman melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : a.sistem pengelolaan air limbah domestic; b. tugas dan wewenang; c. peran masyarakat; d. kerja sam; e. perizinan; f. retribusi; g. pengawasan; h. pendanaan, serta i. ketentuan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2023, ditetapkan pada tanggal 30 November 2023.
 - Penjelasan : 1 hlm.